

# KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DI JATINANGOR

Oleh

**Gatiningsih**

---

## Abstract

Relocation of four high education institutes (PT) in Jatinangor area: Padjadjaran University, Indonesian Institute of Cooperative, Institute of Governmental Administration, and Winaya Mukti University had impact on social-economic life of community around them. However, the efforts was not succesful yet in changing the social-economic life of the local community. The facts showed that unemployment rate reached 20%, home industries never had improvement in management area, growth of small enterprize was only 2% during existence of PT's.

The study had objective in formulating improvement of the PT's contribution in providing the innovation and the diffusion of it for developing the local economic. The results of study showed that The PT's contribution were quantitatively sufficient when it was viewed from local economic development (LED/ PEL) perspective. However, it was qualitatively insufficient, the fact showed that there were some social, economic, and psychological factors hampered the community in utilityzing the social services delivered by the PT. This is why the PT should be able to play role as the facilitator, the initiator for other components of PEL such as the private side, the NGO, the local institution, the community and the local government.

**Key words:** relocation, contribution, local community, economic, government, inovation.

## PENDAHULUAN

Dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung, Jatinangor ditetapkan sebagai sub-pusat (*sub-centre*) yang mempunyai fungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan. Untuk mendukung fungsi tersebut, Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 583/SK-PIK/1989. Dengan kebijakan tersebut, empat perguruan tinggi dipindahkan dari Bandung ke Jatinangor yaitu Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Universitas Padjadjaran (Unpad), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan Universitas Winaya Mukti (Unwim).

Keberadaan empat perguruan tinggi tersebut menimbulkan perubahan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Theresia (1998), menunjukkan bahwa keberadaan perguruan tinggi di Jatinangor mengakibatkan pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor jasa dan perdagangan. Penduduk yang kehilangan mata pencaharian karena lahan pertaniannya terjual dan tidak bisa masuk ke sektor lain, terpaksa meninggalkan Jatinangor untuk mempertahankan hidup.

Mardianta (2001), menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi penunjang perguruan tinggi lebih banyak dilakukan oleh pendatang (68,5%) daripada penduduk lokal (31,5%). Dengan demikian perguruan tinggi kurang dapat mengurangi tingkat pengangguran bagi penduduk lokal. Sensus tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor, menunjukkan bahwa lebih dari 21% penduduk di Jatinangor adalah penganggur atau bekerja dengan pola dan penghasilan yang tidak jelas. Pendidikan para pekerja memperlihatkan bahwa hampir 50% lulusan SD dan hanya 4,1% lulusan perguruan tinggi (Forum Jatinangor, 2004).

Angka di atas memperlihatkan bahwa kawasan Jatinangor menghadapi dua persoalan yaitu pengangguran dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Fasilitas pendidikan tinggi yang tersedia tidak dikonsumsi oleh masyarakat Jatinangor sendiri, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan dengan keberadaan perguruan tinggi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang.

Untuk mengeliminasi permasalahan di atas diperlukan langkah bersama untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Jatinangor. Salah satu konsep yang melibatkan

seluruh aktor dan berbasis pada potensi lokal adalah pengembangan ekonomi lokal (PEL)/ *local economic development* (LED). Konsep ini menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai fokus di mana masyarakat tidak hanya dijadikan obyek berbagai proyek pembangunan, akan tetapi sebagai subyek pembangunan.

PEL merujuk pada suatu bentuk khusus dari pengembangan lokal di mana faktor-faktor internal atau lokal memainkan peran utama. PEL merupakan pembangunan berdasarkan lokalitas (*locality based development*). Keberhasilannya sangat ditentukan oleh tumbuhnya wirausaha setempat yang didukung oleh kelembagaan di wilayah tersebut, yang meliputi universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, pengusaha lokal, industri dll.

Blakely (1989), mengemukakan bahwa PEL adalah konsep yang esensial di mana pemerintah lokal atau kelompok yang bertumpu pada masyarakat mengelola sumber daya yang ada membentuk jaringan kerja kemitraan dengan sektor swasta atau sesama kelompok untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menstimulasi kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu. Jadi menurut konsep ini, penciptaan lapangan kerja yang bertumpu pada sumber

daya, masyarakat serta lembaga lokal menjadi tujuan utama.

Coffey dan Polese (1985), menegaskan bahwa inti PEL adalah kewirausahaan serta usaha ekonomi lokal. Sifat kewirausahaan tersebut dapat muncul apabila sumber inovasi kewirausahaan tersedia dan dapat dicapai dengan mudah.

Dalam konteks negara sedang berkembang khususnya di Indonesia, inovasi kewirausahaan sulit diciptakan oleh masyarakat lokal karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan finansial dan fasilitas. Oleh karena itu, intervensi sumber inovasi seperti lembaga penelitian perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat, lembaga penelitian departemen dan non-departemen, swasta dan lembaga sosial sangat diperlukan. Intervensi berbagai lembaga tersebut sangat diperlukan oleh karena PEL memerlukan pembaharuan berbagai aspek misalnya manajemen, proses produksi, pemasaran, hubungan kemitraan dan lain-lain. Lembaga lokal milik pemerintah (lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan dinas-dinas) mempunyai peran penting dalam meningkatkan suplai inovasi ke masyarakat sekitarnya dan mengembangkan jaringan kewirausahaan (Blair, 1995).

Dalam konteks Jatiningor, lembaga yang dapat berperan dalam PEL, khususnya sebagai

sumber inovasi antara lain Universitas Padjadjaran yang mempunyai bidang kajian pertanian, kesehatan, sospol, bahasa, komunikasi dan psikologi, Universitas Winaya Mukti dengan bidang kajian manajemen, pertanian, kehutanan dan teknik, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang mempunyai bidang kajian pemerintahan, administrasi, kepemimpinan dan kemasyarakatan, serta Ikopin dengan bidang kajian manajemen keuangan, sumber daya manusia, produksi dan pemasaran. Empat perguruan tinggi tersebut sudah memadai untuk dapat berperan sebagai inkubator inovasi untuk meningkatkan kewirausahaan serta peluang ekonomi bagi masyarakat di Jatinangor.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- Se jauh mana peran perguruan tinggi sebagai penyedia dan penyebar inovasi ?
- Faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya peran tersebut ?
- Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi lokal?

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian seperti diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan

rekomendasi untuk peningkatan peran perguruan tinggi setempat dalam pengembangan ekonomi lokal di Jatinangor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif dengan statistik untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di suatu tempat pada waktu tertentu. Alat statistik yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan persentase.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha ekonomi baik petani, pedagang, pengrajin maupun pengusaha yang pernah mendapat pembinaan dari keempat perguruan tinggi (STPDN, Ikopin, Unwim dan Unpad) yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pemilihan responden dilakukan dengan metode acak sederhana (*simple random sampling*). Penentuan jumlah sampel yang diambil berdasarkan tabel Krejcie. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Wilayah penelitian adalah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari dua belas desa yaitu Desa Cibeusi, Cipacing, Cikeruh, Sayang, Cintamulya, Cileles, Cilayung,

Hegarmanah, Jatiroke, Jatimukti, Cisempur, dan Mekargalih.

## **PERAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI SUMBER INOVASI**

Keterlibatan masyarakat dan lembaga lokal dalam pengelolaan sumber daya di suatu wilayah merupakan pilar utama PEL. Mengacu pada situasi lokal yang didominasi oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan bersifat tradisional, mengharapkan masyarakat secara mandiri mempelajari dan memanfaatkan inovasi usaha adalah tidak mungkin karena hambatan psikologis, keterbatasan pengetahuan dan ekonomi.

Perguruan tinggi diharapkan berperan aktif dalam melatih dan membina masyarakat dalam menerapkan inovasi sekaligus memantau dan mengevaluasi. Kajian peran aktif perguruan tinggi meliputi penyebaran inovasi melalui pengabdian masyarakat, tanggapan kelompok sasaran, permasalahan dalam penyebaran inovasi serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi di wilayah Jatinangor.

## **PENYEBARAN INOVASI MELALUI PENGABDIAN MASYARAKAT**

Kegiatan perguruan tinggi terfokus pada penyebaran dan pengembangan pengetahuan.

Kegiatan tersebut dilakukan secara terprogram dan kontinyu, sehingga persediaan inovasi cukup banyak dan terus bertambah. Di luar perguruan tinggi kondisinya sangat berbeda. Sebagian besar anggota masyarakat mempunyai pengetahuan terbatas dan sangat memerlukan inovasi untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki atau memperbaiki kinerja kegiatan ekonominya.

Kesenjangan inovasi tersebut mencetuskan komitmen perguruan tinggi akan tanggung jawab moral untuk memberikan inovasi kepada masyarakat, sehingga di seluruh perguruan tinggi didirikan lembaga pengabdian masyarakat sebagai media untuk melaksanakan maksud tersebut. Di sisi lain didirikan pusat-pusat penelitian dengan fungsi utama sebagai *incubator* inovasi.

Kegiatan tersebut terdapat pada STPDN, Ikopin, Unwim dan Unpad. Masing-masing perguruan tinggi tersebut mempunyai lembaga penelitian dan lembaga pengabdian masyarakat dengan fokus penyebaran inovasi yang berbeda-beda, sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain sebagai berikut.

- 1) *LPM Unpad*, kegiatan dititikberatkan pada penciptaan wirausaha baru, waktu pelaksanaan relatif sebentar yaitu satu hari untuk kegiatan

penyuluhan dan paling lama lima hari untuk kegiatan pelatihan. Penyelenggaraan kegiatan bersifat insidental. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum (non bisnis). Inovasi yang diberikan cenderung bersifat memberi keterampilan untuk menciptakan produk, seperti pelatihan rancang bangun bel elektronik, pelatihan budidaya ikan, pelatihan sablon, cetak grafis dan lain-lain.

- 2) *LPPM Ikopin*, substansi kegiatan usaha terfokus pada pengembangan usaha, mencakup perbaikan produk, proses, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Inovasi penciptaan wirausaha baru dan kesinambungan usaha disosialisasikan dalam skala kecil. Waktu pelaksanaan satu minggu sampai enam bulan. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pembinaan secara terprogram. Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha (bisnis).
- 3) *Pusat Kajian STPDN*, lembaga ini tidak mempunyai orientasi usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk praktek kerja lapangan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa (praja) dengan materi pemerintahan, pem-

angunan dan kemasyarakatan meliputi administrasi desa, tata ruang kantor, pengaktifan lembaga desa, pembangunan prasarana fisik desa, penggunaan teknologi tepat guna dan kegiatan keagamaan. Waktu pelaksanaan berkisar dari dua minggu sampai dengan tiga bulan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan dan pembinaan secara terprogram. Sasaran kegiatan bersifat umum yaitu aparat desa dan masyarakat.

- 4) *LPPM Unwim*, tidak seperti ketiga lembaga perguruan tinggi lainnya lembaga ini tidak mempunyai kegiatan yang mengarah pada pengabdian masyarakat secara langsung melainkan didominasi oleh kerja sama dengan pemerintah dan swasta. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk praktek kerja lapangan oleh mahasiswa dari fakultas tertentu di mana sivitas akademika tidak terlibat di dalamnya.

Dalam periode sebelas tahun (1993 - 2003), Unpad berhasil menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebanyak 801 kegiatan, Ikopin 94 kegiatan, sedangkan STPDN dan Unwim masing-masing 55 dan 25 kegiatan.

Hal yang menarik adalah terjadinya penurunan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat di Unpad, sedangkan di Ikopin terjadi kenaikan. STPDN mempunyai kegiatan yang konstan dan Unwim mulai melakukan kegiatan selama empat tahun terakhir (1999 – 2003). Lihat tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Kegiatan pengabdian masyarakat perguruan tinggi di Jatinangor (1993 – 2003)

No	Tahun	UNPAD		IKOPIN		*)STPDN		UNWIM		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	1993	70	8,7	0	0,0	5	9,1	0	0	75	7,7
2	1994	88	11,0	6	6,4	5	9,1	0	0	99	10,2
3	1995	84	10,5	12	12,8	5	9,1	0	0	101	10,4
4	1996	100	12,5	7	7,4	5	9,1	0	0	112	11,5
5	1997	121	15,1	12	12,8	5	9,1	0	0	138	14,2
6	1998	90	11,2	16	17,0	5	9,1	0	0	111	11,4
7	1999	122	15,2	4	4,3	5	9,1	0	0	131	13,4
8	2000	80	10,0	7	7,4	5	9,1	1	4,0	93	9,5
9	2001	**11	1,4	4	4,3	5	9,1	7	28,0	27	2,8
10	2002	**15	1,9	2	2,1	5	9,1	13	52,0	35	3,6
11	2003	**20	2,5	24	25,5	5	9,1	4	16,0	53	5,4
Total		801	100	94	100,0	55	100,0	25	100,0	975	100,0

**Sumber :** LPM Unpad, LPPM Ikopin, LPPM Unwim, Pusat Kajian Pemerintahan dan Bidang Pelatihan STPDN (dengan pengolahan, 2004).

**Keterangan :**

- \*) : STPDN satu kegiatan dilaksanakan di lima kecamatan masing-masing dua belas desa (60 desa)
- \*\*): tidak ada rekap laporan tahunan, data diambil dari jurnal pengabdian kepada masyarakat

Penyebab terjadinya kondisi di atas adalah perubahan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri, pendanaan Unpad untuk pengabdian masyarakat dipengaruhi oleh situasi ekonomi negara. Ketika situasi perekonomian negara sedang surut sebagaimana terjadi sejak tahun 1997, alokasi dana untuk kegiatan tersebut

berkurang sehingga mengurangi pelaksanaan pengabdian masyarakat. Sebaliknya pada Ikopin terjadi kenaikan kegiatan pengabdian yang signifikan. Peningkatan ini terkait dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yang dalam pelaksanaannya melibatkan Ikopin.

**Tabel 2.** Kegiatan penelitian perguruan tinggi di Jatinangor (1993 - 2003)

No	Tahun	UNPAD		IKOPIN		STPDN		UNWIM		Total		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	1993	n.a	0	0	3	4,7	0	0	0	0	3	1,1
2	1994	n.a	0	0	5	7,8	0	0	0	0	5	1,8
3	1995	n.a	0	0	4	6,3	0	0	0	0	4	1,4
4	1996	n.a	0	0	1	1,6	0	0	0	0	1	0,4
5	1997	n.a	0	0	10	15,6	4	5,6	0	0	14	5,1
6	1998	n.a	0	0	1	1,6	0	0	0	0	1	0,4
7	1999	n.a	0	0	8	12,5	5	6,9	2	8,0	15	5,4
8	2000	**15	12,9	1	1,6	21	29,2	6	24,0	43	15,5	
9	2001	**37	31,9	1	1,6	6	8,3	6	24,0	50	18,1	
10	2002	**31	26,7	6	9,4	16	22,2	10	40,0	63	22,7	
11	2003	**33	28,4	24	37,5	20	27,8	1	4,0	78	28,2	
Jumlah		116	100,0	64	100,0	72	100,0	25	100,0	277	100,0	

**Sumber :** LP Unpsd, LPPM Ikopin, LPPM Unwim, Bidang Litbang STPDN (dengan pengolahan, 2004)

**Keterangan :**

n.a : data tidak tersedia

\*\*\*) : data diambil dari jurnal penelitian *Bionatura dan Sosiohumaniora*

Dalam kegiatan penelitian, pengaruh situasi ekonomi dan kebijakan pemerintah juga terjadi secara signifikan, khususnya di Unpad dan Ikopin. STPDN mempunyai kasus yang sama dengan Ikopin, pelaksanaan otonomi daerah mempengaruhi keterlibatan lembaga tersebut dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan otonomi daerah, sehingga frekuensi penelitiannya meningkat.

Peran perguruan tinggi di Jatinangor dapat dilihat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas peran perguruan tinggi terlihat dari frekuensinya pelaksanaan pengabdian masyarakat dimana Jatinangor menerima porsi terbesar pengabdian (55 %

atau 40%) dibandingkan dengan pengabdian di wilayah Sumedang secara keseluruhan. Jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan penyebaran di kecamatan lain dari wilayah yang sama (Kabupaten Sumedang). Secara kualitas pengabdian masyarakat dapat dilihat dari materi pengabdian yang diberikan. Terlihat bahwa 32,7% materi yang diberikan berkaitan dengan kewirausahaan, selebihnya merupakan materi non kewirausahaan, seperti pelayanan kesehatan, penyuluhan hukum, administrasi pemerintahan, lingkungan hidup dan lain-lain.

Penentuan kelompok sasaran kegiatan pengabdian pada

masyarakat tergantung pada substansi dan tujuan kegiatan. Ikopin memilih sasaran secara selektif yaitu masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan bisnis. Jika jangka waktu pelaksanaan kegiatan antara 3 - 6 bulan, lembaga ini mengadakan seleksi dengan tes tertulis dan wawancara oleh tim psikolog. Tiga perguruan tinggi lainnya menentukan sasaran dengan cara yang cukup longgar, menyesuaikan dengan calon pengguna materi. Sebagai contoh untuk pembinaan peternakan, Unpad memilih kawasan yang sebagian masyarakatnya memiliki ternak, tanpa menyeleksi lebih dulu apakah kegiatan beternak tersebut merupakan kegiatan primer atau sekunder.

Secara umum metode penyampaian materi pengabdian meliputi: ceramah (*tell*), tanya-jawab (*discussion*), demonstrasi (*show*), dan praktek (*practice*). Jika penyuluhan diselenggarakan dalam waktu singkat (1 - 2 hari) metode yang diterapkan lebih banyak berbentuk ceramah, diskusi dan demonstrasi. Metode ini banyak diterapkan oleh Unpad dan Unwim. Jika penyuluhan dilakukan lebih dari satu minggu, metode yang diterapkan lengkap dari ceramah sampai dengan praktek. STPDN menerapkan metode yang seimbang antara praktek dan teori, sedangkan Ikopin menerapkan teori dan praktek yang dilanjutkan dengan pendampingan.

Perkiraan biaya yang telah dikeluarkan oleh perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian dan penelitian selama sebelas tahun mencapai kurang lebih Rp 24.379.500.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pengabdian masyarakat Rp18.181.500.000,00 (delapan belas milyar seratus delapan puluh satu lima ratus ribu rupiah), dan penelitian sebesar Rp 6.198.000.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Jika dirata-rata setiap tahun maka biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 2.216.318.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Untuk wilayah Jatinangor biaya tersebut sebesar Rp 1.356.000.000,00 atau rata-rata Rp 123.272.700,00 per tahun.

### **TANGGAPAN KELOMPOK SASARAN**

Karakteristik peserta kegiatan penyuluhan dapat diketahui dari beberapa aspek yaitu umur, pendidikan, jenis pekerjaan, latar belakang pekerjaan orang tua (keluarga), jenis usaha dan skala usaha. Terlihat bahwa 75,8% sasaran mempunyai umur antara 21 - 50 tahun yang dapat dikategorikan usia produktif. Sejumlah 24,2 % berumur 51 - 70 tahun, kelompok ini dapat digolongkan kurang produktif.

Lebih dari 50% target penyuluhan hanya lulus sekolah dasar, sedangkan kelompok sasaran yang berpendidikan tinggi dan sekolah menengah atas hanya 30,5%. Ini dapat memberikan gambaran awal kemampuan kognitif terhadap penerimaan dan penyerapan inovasi baru pada kelompok masyarakat tersebut.

Kelompok sasaran penyuluhan mempunyai cukup variasi pekerjaan. Mereka yang bekerja pada sektor kerajinan merupakan peserta yang dominan. Bersama dengan kelompok pedagang, kedua kelompok pekerjaan ini mencapai persentase 43,6%. Angka ini memberikan gambaran sekilas bahwa jenis pekerjaan yang bersifat bisnis tumbuh di tengah masyarakat. Pengrajin yang mempunyai latar belakang keluarga dengan pekerjaan sebagai pengrajin berjumlah cukup besar (59,4%). Dengan demikian diduga keahlian sebagai pengrajin tercipta karena pengaruh lingkungan keluarga.

Dari kelompok sasaran yang berjumlah 128 orang, yang mempunyai orientasi usaha atau bisnis berjumlah 58 orang (45,3%). Kelompok pengrajin mempunyai

persentase yang besar (87,9%). Secara ekstrem petani yang berorientasi bisnis hanya berjumlah satu orang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sebagian besar usaha tani di kawasan ini bersifat subsisten, artinya sebagian besar hasil usaha hanya cukup untuk memenuhi keperluan atau konsumsi keluarganya bukan untuk orientasi bisnis (luas lahan garapan antara 50 sampai dengan 200 tumbak).

Dari karakteristik usaha ekonomi 93% kelompok sasaran mempunyai omset kurang dari Rp 30.000.000,00 per bulan. Besar asset yang mereka miliki kurang dari Rp 200.000.0000,00 sebanyak 55 orang (95%). Pemasaran hasil usaha meliputi wilayah lokal, nasional dan internasional. Input usaha diperoleh dari wilayah Jatinangor, Sumedang dan Bandung.

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PERAN PERGURUAN TINGGI**

Ketersediaan materi pembinaan sangat tergantung pada disiplin ilmu yang ditekuni dan pengembangan disiplin ilmu tersebut melalui penelitian. Empat

perguruan tinggi mempunyai banyak disiplin ilmu yang mendukung pembinaan usaha. Bidang manajemen terdapat pada Unpad, Ikopin dan Unwim. Arsitek dan desain ada di Unwim, pembinaan mental dan kemampuan diri ada di Fakultas Psikologi Unpad, peran pemerintah daerah terdapat di STPDN dan Unpad. Hal-hal yang menjadi kendala adalah bahwa penyebaran inovasi melalui lembaga pengabdian dan penciptaan inovasi melalui lembaga penelitian tergantung pada kepentingan dan minat pengajar dari perguruan tinggi masing-masing, sehingga materi-materi pengabdian dan penelitian tidak ada yang terfokus pada suatu permasalahan tetapi sesuai dengan minat pengajar. Fenomena ini terjadi karena sumberdana dari Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi) dan dana rutin perguruan tinggi tidak menentukan persyaratan tentang tema pengabdian maupun penelitian.

Persyaratan dari sumber dana memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemilihan topik pengabdian. Dana yang berasal dari dinas koperasi mengarahkan topik-topik yang berkaitan dengan kewirausahaan, Ikopin merupakan salah satu perguruan tinggi yang menggunakan dana tersebut. Riset unggulan terpadu (RUT), dana

penelitian yang berasal dari masyarakat Eropa (*European Community*) dan dana-dana penelitian yang berasal dari luar negeri selalu mensyaratkan indikasi dampak hasil penelitian terhadap kepentingan umum walaupun topiknya bebas. Namun, persaingan untuk mendapatkan dana di luar DIKTI dan rutin dari perguruan tinggi sangat ketat, sehingga pengabdian dan penelitian yang dibiayai oleh pihak luar jumlahnya sedikit.

Kendala penciptaan dan penyebaran inovasi secara internal terdapat pada kepentingan dan minat pengabdian atau penelitian, persyaratan perolehan dana yang longgar serta kemampuan mendapatkan dana khususnya dari pihak luar. Walaupun lembaga penelitian dan pengabdian mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam menentukan materi pengabdian dan penelitian pada masing-masing perguruan tinggi. Namun, sampai saat ini belum dilakukan sehingga pengabdian dan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersifat menyebar dan parsial. Fenomena-fenomena di atas, menyebabkan kinerja penelitian dan pengabdian menjadi tidak lengkap, waktu pelaksanaan sebentar, tidak ada tindak advokasi dan pemberian stimulan serta pendanaan terbatas (Tabel 3).

**Tabel 3.** Faktor-faktor penghambat penyediaan, penyebaran dan penerimaan inovasi

No.	Perihal	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Penyediaan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada persyaratan untuk materi penelitian sehingga tidak terfokus pada suatu permasalahan.</li> <li>• Topik atau materi tergantung pada kepentingan dan minat pengajar</li> <li>• Jumlah dana dari perguruan tinggi dan DIKTI kecil sehingga penelitian tidak dilakukan secara lengkap</li> <li>• Kompetisi yang ketat, untuk mendapatkan biaya penelitian dengan jumlah yang besar (dari luar perguruan tinggi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan dana untuk penelitian</li> </ul>
2.	Penyebaran Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi pengabdian tergantung pada minat dan kepentingan penyebar inovasi</li> <li>• Dana terbatas, sehingga materi yang disampaikan tidak lengkap dan waktu pelaksanaan sebentar</li> <li>• Untuk pelaksanaan materi secara lengkap sangat tergantung pada penyandang dana dari luar perguruan tinggi.</li> <li>• Sarana dan prasarana praktek tidak mendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya dukungan dana dari pemerintah untuk kegiatan pengabdian masyarakat, sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan secara komprehensif.</li> <li>• Sifat komersil yang menggejala di masyarakat</li> </ul>
3.	Penerimaan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya tindak advokasi dan pemberian stimulan</li> <li>• Pendanaan yang terbatas</li> <li>• Tidak adanya tindak lanjut (pasca pembinaan)</li> <li>• Studi awal tidak memadai</li> <li>• Komposisi materi (materi dan praktek tidak seimbang)</li> <li>• Seleksi peserta pembinaan yang longgar</li> <li>• Salah urus pemberian stimulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan penguasaan materi terbatas</li> <li>• Tidak memiliki sarana yang dibutuhkan</li> <li>• Keengganan menanggung resiko</li> <li>• Menghadapi kelangkaan modal</li> <li>• Biaya praktek yang tidak terjangkau</li> <li>• Kebiasaan yang sulit diubah akibat pengaruh keluarga dan lingkungan (turun-temurun)</li> <li>• Rasa tanggung jawab yang kecil (khususnya dalam pengembalian modal)</li> <li>• Hambatan psikologis dalam berkomunikasi</li> <li>• Terkena musibah (bencana alam)</li> <li>• Kecilnya skala usaha</li> <li>• Tingkat pendidikan rata-rata rendah</li> </ul>

Sumber : Hasil pengolahan

Secara umum faktor-faktor yang berasal dari perguruan tinggi muncul karena ada kemampuan dan kepentingan yang berbeda. Kemampuan pendanaan yang kecil menyebabkan durasi kegiatan pendek serta materi yang diberikan tidak komprehensif. Tidak dilakukannya studi awal dengan baik kemungkinan juga disebabkan oleh faktor tersebut. Kepentingan perguruan tinggi yang berbeda-beda juga mewarnai pembinaan di Jatinangor. Pembinaan yang didasari atas maksud pegabdian murni pada umumnya berlangsung cepat, namun pembinaan yang sudah memasukkan unsur komersial memungkinkan dilakukannya dalam waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi oleh karena dalam pendanaan menyertakan sumber dana dari pihak luar.

Hambatan yang dialami masyarakat dalam mengembangkan inovasi antara lain kurangnya pemahaman terhadap materi kegiatan, ketersediaan modal terbatas, kekhawatiran menanggung risiko, kendala psikologis dan kondisi alam yang tidak mendukung. Adapun kendala-kendala internal yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam penyebaran inovasi terkait erat. Tidak terfokusnya tema penelitian dan pengabdian, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi, kontinuitas dana yang

rendah serta kecilnya alokasi dana untuk penyebaran inovasi.

Kebijakan pemerintah di kawasan ini dinilai kurang mendukung pengembangan wirausaha yang ada. Kebijakan semacam itu antara lain penerbitan ijin usaha waralaba yang mematahkan usaha kecil yang telah dibina perguruan tinggi, tumpang tindihnya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang satu dengan yang lainnya. Sikap masyarakat yang telah terbiasa menerima bantuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah pada masa lalu menyebabkan keengganan masyarakat untuk terlibat dalam pembinaan kewirausahaan.

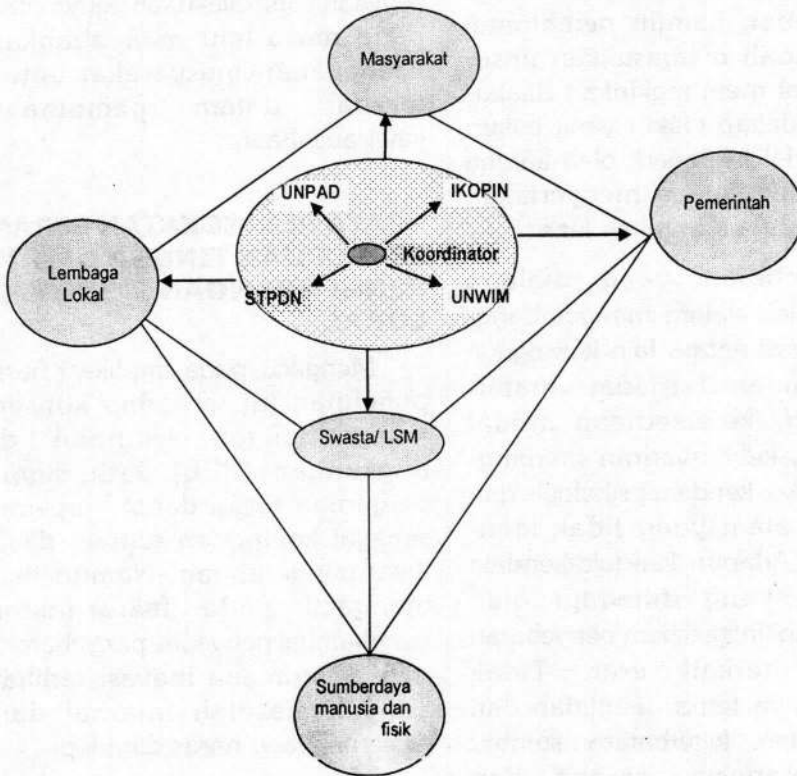
### **UPAYA PENINGKATAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL**

Mengacu pada implikasi hasil penelitian ini terhadap konsep pengembangan ekonomi di lingkungan (PEL) Jatinangor, perguruan tinggi dapat berperan sebagai komponen sumber daya ilmu pengetahuan. Namun jika mengacu pada faktor-faktor penghambat penyedia, penyebaran, dan penerimaan inovasi terlihat banyak masalah internal dan eksternal yang harus dihadapi.

Langkah pertama untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengarahkan tema-tema penelitian

pada masalah tertentu sehingga didapatkan kajian yang lengkap atas satu permasalahan. Langkah ini dapat dilakukan jika keempat perguruan tinggi tersebut mengintegrasikan misi penelitian dan pengabdian. Untuk itu diperlukan forum sebagai media untuk berdiskusi dan memerlukan koordinator yang berasal dari salah satu perguruan tinggi yang memimpin langkah-langkah integrasi program dan kegiatan (lihat gambar).

Jika forum sudah terbentuk perlu didiskusikan peranan masing-masing perguruan tinggi dalam penelitian dan pengabdian, sekaligus membahas koordinasi program dan rencana pelaksanaannya. Jika dimungkinkan forum rektor dapat diaktifkan kembali untuk tujuan pengintegrasian. Namun, jika hal ini sulit dilakukan karena forum terlalu tinggi strukturnya, maka pembentukan forum LPM dan LP sangat dimungkinkan mengingat lingkup tugasnya relatif sama.



Gambar: Posisi Perguruan Tinggi dalam Konsep PEL Jatininggor

Langkah selanjutnya adalah peningkatan produksi penelitian maupun penyebarannya dengan menggali sumber-sumber dana di luar perguruan tinggi dan Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti). Keempat perguruan tinggi dapat bekerja sama untuk pencarian dana yang berasal dari pemerintah dan non-pemerintah. Kerja sama dengan pemerintah dapat dilakukan dengan Pemda Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, LIPI melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Daerah (Iptekda), Menristek melalui Riset Unggulan Terpadu (RUT), dan masih banyak sumber-sumber yang dapat digali.

Sumber-sumber yang berasal dari luar negeri antara lain Masyarakat Eropa, Ford Foundation, Usaid, Habitat International, GTZ (Pemerintah Jerman), dan sebagainya. Pengintegrasian penelitian dari empat perguruan tinggi ini dengan topik yang sama otomatis akan meningkatkan jumlah dan keragaman inovasi.

Dalam kaitannya dengan konsep PEL perguruan tinggi harus mereposisi perannya, tidak hanya sebagai sumber inovasi tetapi juga sebagai inisiator dan fasilitator. Hal ini dilandasi oleh informasi bahwa sedikit masyarakat yang memanfaatkan jasa konsultasi bisnis yang diadakan oleh Pusat Inkubator Bisnis (PIBI) secara gratis. Oleh karena itu perguruan tinggi sebaiknya mengambil inisiatif

dalam penyebaran inovasi yang diperlukan dalam PEL.

Perannya sebagai fasilitator dilandasi oleh alasan bahwa perguruan tinggi menguasai inovasi tentang PEL dan mempunyai fasilitas untuk menerapkan PEL tersebut, misalnya gedung, peralatan presentasi, laboratorium, lahan percobaan pertanian, dan lain-lain.

Dalam hubungannya dengan lembaga lokal, perguruan tinggi sebaiknya mengambil inisiatif dan memberikan pembinaan/ pendampingan terhadap lembaga yang ada, oleh karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah banyak koperasi atau paguyuban sebagai wadah peningkatan usaha peternakan, kerajinan dan pertanian yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, perguruan tinggi juga harus mengadakan hubungan kerja asama secara selektif dan terprogram. Seleksi secara sungguh-sungguh perlu dilakukan oleh karena hasil kajian menunjukkan bahwa hanya peserta yang mempunyai karakteristik tertentu saja yang berhasil mengembangkan usaha.

Kaitannya dengan pemerintah, perguruan tinggi dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan di kawasan ini. Gagasan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga-lembaga binaannya. Dalam konteks ini Forum Jatinangor dapat menjadi media yang efektif untuk

mempengaruhi pemerintah, oleh karena keberadaannya sudah dikenal dan diakui pemerintah.

Hubungannya dengan pihak swasta atau LSM, perguruan tinggi dapat mendorong hubungan kerja sama (*networking*). Merujuk pada kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di wilayah ini, kerja sama dengan pihak-pihak lain sangat diperlukan meliputi inovasi pemasaran, pengadaan modal, perbaikan produk, dan peningkatan kualitas peralatan.

Perguruan tinggi secara bersama-sama mempunyai peran mensinergikan pemanfaatan atau pengembangan sumber daya alam yang ada di Jatinangor, diperlukan ada perguruan tinggi yang mampu menyatukan arah tindakan dari perguruan tinggi yang lain, menyusun kerangka dasar penelitian dan pengabdian masyarakat dengan topik tertentu yang mengarah pada peningkatan ekonomi. Kemudian menyosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh komponen PEL dan secara bersama-sama merumuskan rencana dan rencana tindak kegiatan tiap-tiap komponen beserta pendanaannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil inventarisasi kegiatan perguruan tinggi terkait penyebaran inovasi selama periode sebelas tahun menunjukkan bahwa secara

kuantitatif sudah mencukupi untuk pengembangan usaha. Namun dalam perspektif pengembangan ekonomi wilayah secara kualitatif belum mencukupi. Dari lima puluh lima kegiatan penyebaran inovasi di Jatinangor, sebelas kegiatan dapat dikategorikan dalam inovasi kewirausahaan, enam kegiatan penciptaan kewirausahaan, dan lima kegiatan pengembangan kewirausahaan. Kegiatan yang mengarah pada keberlanjutan dari kewirausahaan belum ada yang dilaksanakan di Jatinangor.

Karakteristik peserta yang berhasil dalam menerapkan inovasi kedua kegiatan tersebut mempunyai kecenderungan yang hampir sama, yaitu tingkat pendidikan lulus SLTA dan perguruan tinggi; umur dalam usia produktif, mempunyai latar belakang keluarga bisnis serta memiliki skala usaha tinggi (omset penjualan mencapai 30-40 juta sebulan).

Hambatan yang dialami perguruan tinggi dalam penyediaan, penyebaran dan penerimaan inovasi meliputi tema/ materi pengabdian dan penelitian tidak terfokus pada suatu permasalahan, jumlah dana yang tersedia kecil, kompetisi untuk mencari dana dari luar perguruan tinggi sangat ketat. Dari sisi masyarakat kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman terhadap materi kegiatan, ketersediaan modal terbatas, kekhawatiran menang-

gung risiko, kendala psikologis dan kondisi alam yang tidak mendukung.

Berdasarkan hasil identifikasi peran perguruan tinggi serta hambatan yang dialami maka dirumuskan rekomendasi bahwa keberadaan perguruan tinggi akan

lebih bermakna jika perguruan tinggi tersebut dapat memberikan kontribusinya sebagai inisiator dan fasilitator bagi lembaga lainnya yang terlibat dalam PEL di Jatinangor, seperti pihak swasta/LSM, lembaga-lembaga lokal, masyarakat serta pemerintah.

## KEPUSTAKAAN

- Blair, J.P. 1995. *Local Economic Development Analysis and Practice*. Sage Publications.
- Blakely, E.J. 1989. *Planning Local Economic Development Theory and Practice*. Sage Publications .
- Bapeda. 2004. *Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Jatinangor, Kompilasi Data*. Sumedang: Badan Perencanaan Daerah Sumedang.
- Bapeda. 2004. *Peningkatan Daya Saing Ekonomi Sumedang*. Sumedang: Badan Perencanaan Daerah Sumedang
- Coffey, H. and Polese. 1984. "The Concept of Local Development: A Stages Model of Endogenous Regional Growth," Papers of Regional Science Association.
- Dinas Pertanian. 2004. *Laporan Tahunan Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan Jatinangor*. Sumedang: Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.
- Drucker, Peter F. 1996. *Inovasi dan Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Firman, Tommy. 1997. "Pengembangan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Lokal" dalam *Prisma* 3, Maret 1997. Jakarta: LP3ES.
- Kao, Raymond W.Y. 1995. *Entrepreneurship: a Wealth Creation and Value Adding Process*. Singapore: Prentice Hall.
- Mardianta, Anthoni Veery. 2001. *Identifikasi Awal Dampak Kegiatan Pendidikan Tinggi Pada Ekonomi Lokal di Jatinangor*. Bandung: Tugas Akhir Jurusan Planologi ITB.
- Mier, R. and R. Bingham. 1993. *Theories of Local Economic Development*. Sage Publisher.

- Prabatmodjo, Hastu. 2000. *Prospects for Flexible Specialisation in Less Developed Countries: The Case of Small-scale Footwear Production in Cibaduyut, Bandung, Indonesia*. Australia: Departement of Geographical Sciences and Planning The University of Queensland.
- Rachmawati, Rini dan Suryanto. 2002. "Konsep Pengembangan Ekonomi Desa Kota sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan, Studi Kasus PARUL di Propinsi Jambi." Makalah Seminar Nasional. Bandung: PWK ITB.
- Razak, Puddu. 2002. "Model Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Konteks Pemberdayaan." Makalah pada Seminar Nasional "Pemberdayaan Masyarakat bagi Penanggulangan Kemiskinan, Sebuah Tantangan dalam Pembangunan Wilayah dan Kota." Bandung: Jurusan Planologi ITB.
- Rogerson, C.M. 1995. "Local Economic Development Planning in Developing World." *Regional Development Dialogue*, 16 (2) : v - xv.
- Theresia, Heppy. 1998. *Dampak Kegiatan Perguruan Tinggi Terhadap Perkembangan Kota Jatinangor*. Bandung: Tugas Akhir Jurusan Planologi ITB.
- Wiranto, Tatag . 2000. *Program-Program Pengembangan Wilayah dan Ekonomi Masyarakat di Daerah*. Jakarta: Bappenas.

---

\*) Dra. Gatingsih, M.T. adalah Dosen STPDN Jatinangor.